

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan pada sebuah negara. Bagi negara berkembang pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada tujuan ini memiliki arti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat, akan memberikan dampak pada pembangunan ekonomi yang tidak merata. Hal tersebut telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti saat krisis moneter pada tahun 1997, satu per satu perusahaan besar tumbang, tetapi bisnis UMKM tetap ada dan berperan bagi perekonomian saat itu. UMKM merupakan solusi untuk menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja. Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi seperti tingginya tingkat.

Menurut Sugiyono (2003) bahwa Kondisi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah

terhadap dolar, banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, dan situasi pada sektor riil menunjukkan banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar). Ditengah guncangan dan tempaan krisis ekonomi yang terjadi saat itu keberadaan usaha kecil menengah tetap bertahan dengan memberikan kontribusi yang besar. Saat krisis ekonomi, usaha kecil menengah terbukti mampu menampung 99,45 persen dari total tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja (Marimbo, 2008). Kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM) pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerja (Suryadharma Ali, 2008) menyatakan bahwa benteng pertahanan ekonomi nasional adalah usaha kecil menengah sehingga bila sektor tersebut diabaikan maka sama halnya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia.

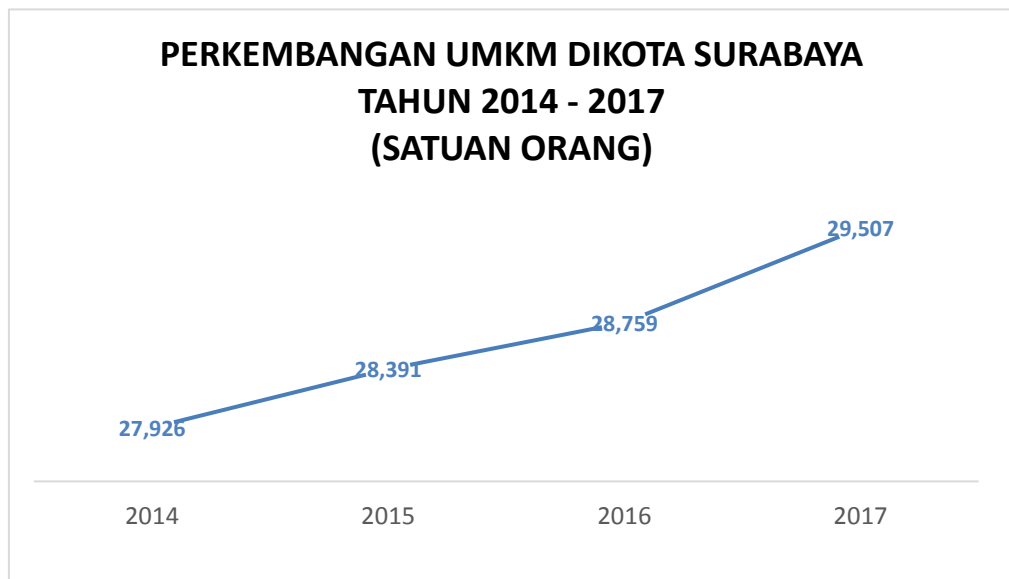
Mengingat kemampuan dan kontribusi dalam perekonomian nasional sangat besar dari kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tingkat Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling bersinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terbentuknya Undang-undang tersebut bermaksud agar pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat ditingkatkan. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan angin segar pada pelaku bisnis. Banyak cara dan upaya pemerintah yang dilakukan terkait pemberdayaan dan pengembangan pada

UMKM, pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu UMKM baik menyangkut peningkatan SDM, permodalan maupun akses pasar. Apabila potensi UMKM mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah, hal tersebut dapat memberi kontribusi bagi perkembangan sebuah wilayah.

Melihat persoalan yang dihadapi UMKM, Pemerintah kemudian meluncurkan kredit dengan pola penjaminan dalam mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan pemerintah didalam pengembangan pemerintah daerah atau otonomi daerah membuat UMKM lebih diperhatikan, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Sehingga perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Peran UMKM di daerah tidak saja sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.

Begitu pula dengan Kota Surabaya untuk menjalankan otonomi daerah salah satunya harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Sehingga Kota Surabaya perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, perlu diketahui banyaknya UMKM yang ada di kota Surabaya. Berikut gambar perkembangan UMKM di Kota Surabaya :

Gambar 1.1



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2017

Dengan melihat gambar perkembangan UMKM di Kota Surabaya yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2017, serta kontribusinya yang cukup besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Besarnya peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian di Kota Surabaya, tidak terlepas dari peranan Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam mengembangkan potensi UMKM. Dalam hal ini yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sebagai jembatan untuk memasarkan produk dari para UMKM agar mampu bersaing dengan UMKM dari kota atau negara lain seperti sering diadakan pameran produk UMKM di Kota Surabaya.

Akan tetapi dengan besarnya potensi UMKM di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, ada beragam masalah yang muncul salah satunya yaitu permodalan. Mayoritas pada UMKM dalam mengembangkan usahanya menggunakan modal pribadi yang jumlahnya terbatas, dan hal tersebut

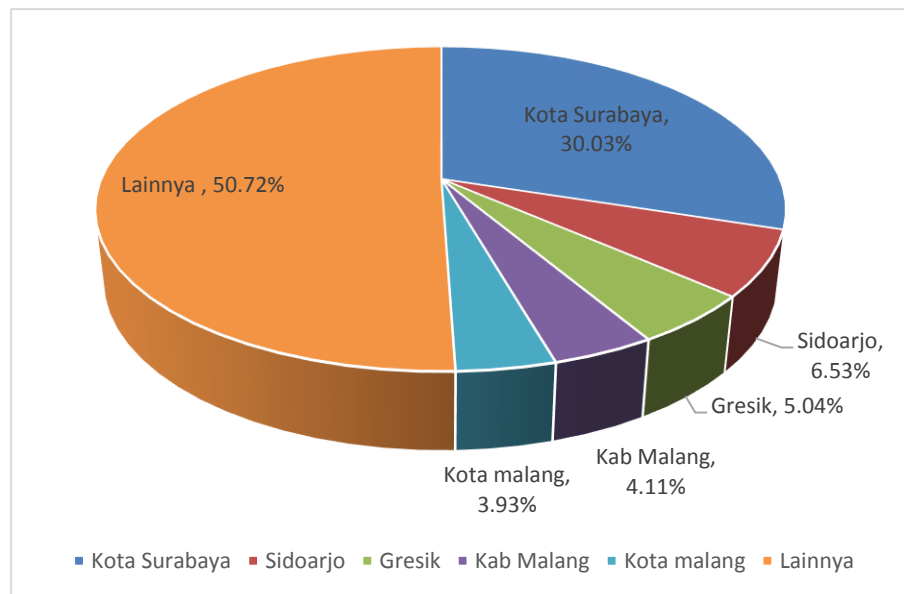
menjadi salah satu kendala klasik dalam pengembangan UMKM. Dengan adanya kendala tersebut dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikeluarkan. Dan ini menjadi awal adanya program Kredit Usaha Rakyat atau disebut KUR.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PML.05/2015 Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada UMKM yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR memiliki bunga pinjaman yang lebih rendah tetapi plafon terbatas. Selain pinjaman KUR yang dapat diakses oleh UMKM, apabila ada UMKM yang kekurangan modal dan tidak bisa mengakses pinjaman KUR bisa mengajukan pinjaman usaha non KUR atau Kredit Usaha Mikro (KUM). Pinjaman usaha non KUR atau KUM menjadi alternative bagi UMKM yang tidak mendapatkan akses pinjaman KUR. Untuk Bunga pinjaman KUM lebih besar dari pada bunga pinjaman KUR. Tetapi proses pengajuan lebih cepat dan persyaratan juga lebih mudah sehingga dapat di jadikan alternative bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usahanya.

Di Kota Surabaya untuk posisi Kredit UMKM secara spasial adalah tertinggi diantara daerah lain di Jawa Timur, kedua Sidoarjo, ketiga Gresik, keempat Kab. Malang dan kelima Kota Malang, kondisi tersebut didominasi pelaku UMKM di sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor Jasa. Kota Surabaya memiliki kontribusi paling tinggi dalam penyaluran kredit UMKM, sehingga mendorong UMKM semakin meningkatkan usahanya, sehingga penelitian ini memilih Kota Surabaya karena memiliki posisi

tertinggi dalam penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur. Untuk melihat kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2
Kredit UMKM Kabupaten/Kota Tahun 2017

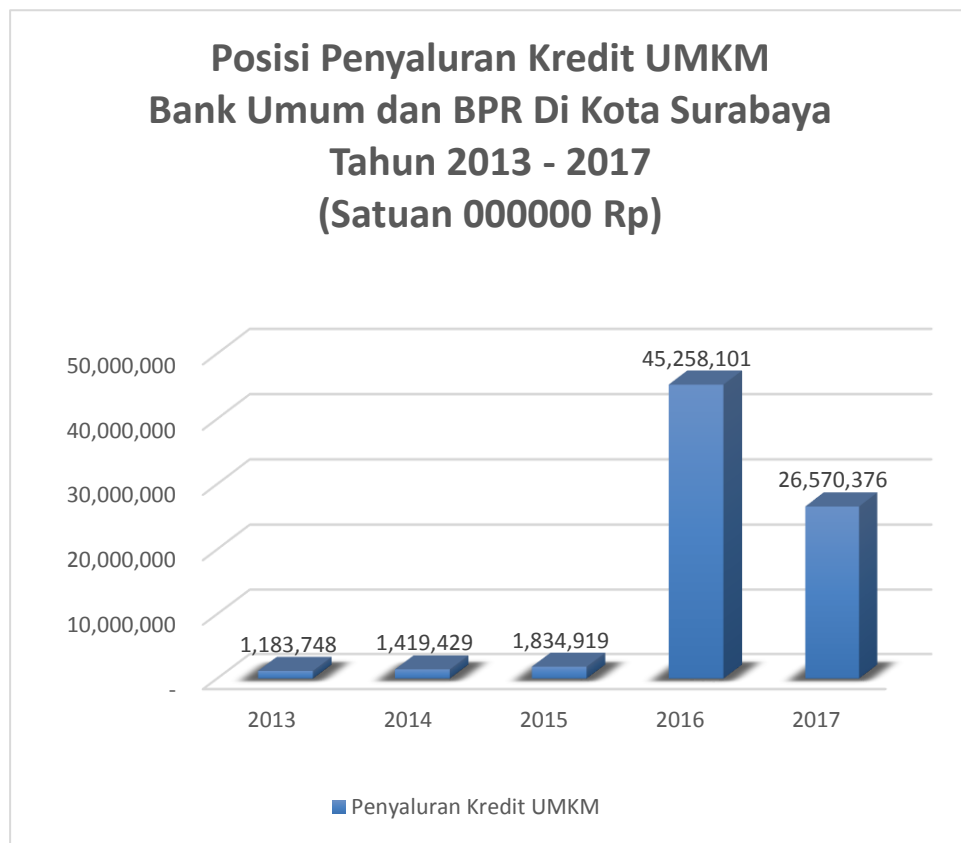


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Dari penyaluran KUR dan KUM di Kota Surabaya disalurkan melalui lembaga keuangan melalui bank umum dan BPR. Dalam pemberian KUR dan KUM memiliki ketentuan masing-masing, untuk pinjaman KUR dapat diakses hanya melalui bank umum dengan bunga pinjaman lebih rendah tetapi akses plafon yang didapat terbatas dan untuk pinjaman KUM dapat diakses melalui bank umum dan BPR tentunya dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi akan tetapi akses plafon yang didapat lebih besar dan tidak terbatas. Adanya hal inilah yang menyebabkan UMKM ketika membutuhkan pinjaman dengan plafon yang lebih besar dan suku bunga pinjaman yang lebih rendah kesulitan untuk mendapatkannya. Sehingga ketika UMKM menginginkan pinjaman dengan bunga rendah harus menerima apabila mendapatkn plafon yang terbatas, akan tetapi ketika

UMKM memang benar-benar butuh pinjaman dengan plafon besar maka harus siap dengan suku bunga yang tinggi. Selain itu hal lain yang menyebabkan UMKM memilih pinjaman dengan bunga tinggi karena prosesnya lebih cepat dan tidak ribet, tidak perlu menunggu hari terkadang sudah bisa langsung cair, sehingga terkadang KUM menjadi alternatif terakhir bagi UMKM yang butuh dana cepat sehingga hal tersebut berdampak pada kurang maksimal dan optimalnya keuntungan pada UMKM. Untuk melihat posisi penyaluran kredit UMKM pada bank umum dan BPR di Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3



Sumber Data : Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Wilayah IV (Jawa Timur)

Dengan gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuatif posisi kredit UMKM di Kota Surabaya dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun

2016 posisi kredit umkm meningkat berdasarkan dari bank umum dan BPR, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan, seharusnya untuk posisi kredit pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan seperti jumlah UMKM di Kota Surabaya, tetapi sebaliknya untuk posisi kredit tahun 2017 mengalami penurunan. Pada penurunan penyaluran kredit ketika suku bunga bank tinggi hal tersebut akan mempengaruhi penurunan permintaan pada kredit. Sebaliknya ketika suku bunga kredit mengalami penurunan, UMKM akan berbondong-bondong mengajukan pinjaman kredit. Kecuali bagi mereka yang benar-benar butuh pinjaman untuk mengembangkan usahanya atau dengan kata lain sudah darurat baru UMKM akan dengan berat hati mengajukan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Oleh sebab itu apabila UMKM tidak begitu membutuhkan tambahan dana untuk usaha akan memilih untuk tidak melakukan pinjaman usaha, dan apabila UMKM membutuhkan tambahan dana untuk usahanya UMKM memilih untuk menggunakan tabungan sendiri bagi yang memiliki tabungan lebih, dan bagi yang tidak memiliki tabungan akan meminjam kepada saudara untuk mencukupi kebutuhan usahanya karena tidak perlu membayar beban bunga tinggi akan tetapi dana yang diporeleh tidak maksimal atau ala kadarnya saja. Sehingga untuk keuntungan yang didapat tentunya juga kurang maksimal karena keterbatasan untuk menambah modal usahanya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Dampak pinjaman usaha KUR dan KUM, tujuannya untuk mengetahui apakah program tersebut telah memberikan dampak yang positif terhadap UMKM di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak pinjaman usaha KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya?
2. Bagaimana dampak pinjaman usaha KUM (Kredit Usaha Mikro) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya?
3. Apakah ada selisih perbedaan dampak pinjaman usaha KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUM (Kredit Usaha Mikro) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak pinjaman usaha KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui dampak pinjaman usaha KUM (Kredit Usaha Mikro) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui adanya selisih perbedaan dampak pinjaman usaha KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUM (Kredit Usaha Mikro) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan acuan tesis bagi mahasiswa yang mengambil tema dan penelitian yang sama, serta memberikan sebuah pandangan

terhadap mahasiswa dalam melakukan observasi dengan tema yang sama.

2. Dapat memberikan manfaat teoritis akan pentingnya dampak pinjaman usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha non KUR atau Kredit Usaha Mikro (KUM) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Usaha non KUR di Kota Surabaya
2. Sebagai sumber informasi dan referensi kepada pemerintah Kota Surabaya dan pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Usaha non KUR di Kota Surabaya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Secara garis besar, kerangka pembahasan masing-masing adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, hal yang dikemukakan antara lain latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang dikemukakan adalah mengenai landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Landasan teori ini diperoleh dari buku-buku selama masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang dapat dijadikan dasar pedoman. Pada bab ini juga dibuat hipotesis dimana peneliti menyusun dugaan dengan berdasarkan dengan teori dan penelitian yang telah ada, serta adanya kerangka pikiran atau model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis.

Bab IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian yakni analisis dan pembahasan tentang pengaruh jumlah industri kecil dan menengah, nilai investasi, dan nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diajukan sebagai hasil dari alternatif pemecahan masalah, sehingga diharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.